

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan desa mempunyai peranan penting dan strategis dalam rangka pembangunan nasional dan pembangunan daerah, karena didalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta menyentuh secara langsung kepentingan sebagian besar masyarakat yang bermukim dipedesaan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan mereka. Dalam pembangunan desa Kepala Desa berkedudukan sebagai subsistem dari system penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, sehingga desa memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. Dalam menyelenggarakan kewenangan, tugas, dan kewajiban desa dalam pemerintahan maupun pembangunan maka dibutuhkan sumber pendapatan desa

Beberapa hal yang menyebabkan desa membutuhkan sumber pendapata yaitu:

1. Desa memiliki Anggaran Pendapatan dan belanja desa (APBDes) yang kecil dan sumber pendapatannya sangat bergantung pada bantuan yang sangat kecil .
2. Kesejahteraan masyarakat desa yang rendah sehingga sulit bagi Desa mempunyai pendapatan asli Desa (PADes) yang tinggi.
3. Masalah itu diikuti dengan rendahnya dana operasional desa untuk menjalankan pelayanan publik.
4. Banyak program pembangunan masuk ke desa akan tetapi hanya dikelola oleh dinas. Program semacam itu bersifat *top down* sehingga tidak sejalan dengan kebutuhan desa dan masyarakatnya.

Desa merupakan wilayah pada sebuah negara yang dihuni oleh sekelompok masyarakat yang juga memiliki batas wilayah tertentu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Pasal 1 Ayat (12) Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Seiring dengan berkembangnya zaman dan semakin majunya teknologi, maka semakin sulit pula bagi pemerintah untuk mengelola sekian banyak wilayah di Indonesia dengan semakin tingginya keberagaman masyarakatnya. Dewasa ini pemerintah Indonesia terus mengupayakan peningkatan pelaksanaan pembangunan nasional agar laju pembangunan daerah serta laju pembangunan desa dan kota semakin seimbang dan serasi. Namun pembangunan nasional pada pelaksanaannya masih dihadapkan masalah pokok pembangunan seperti ketimpangan pembangunan antara desa dan kota di Indonesia. Ketimpangan pembangunan di Indonesia terjadi karena banyak faktor yang mempengaruhinya sehingga pembangunan di Indonesia tidak merata sehingga dampak ada tingginya kemiskinan di Indonesia. Agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan, pemeberian wewenang dan keleluasaan yang luas tersebut di ikuti dengan pengawasan yang kuat.

Dana Desa Yang di kururkan dari Tahun 2015-2019 yang bersumber dari APBN Dapat di gambarkan pada tabel berikut

**Tabel 1.1**  
**Dana Desa Provinsi NTT 2015-2019**

<b>NO</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah ( Rp )</b>
1	2015	812.875.565.000
2	2016	1,800.000.000.000
3	2017	2,300.000.000.000
4	2018	2,500.000.000.000
5	2019	3,200.000.000.000

*Sumber: ekora ntt/2019/07/17/seksinya-dana-desa*

Dana Desa yang di kucurkan oleh pemerintah pusat untuk NTT setiap tahun mengalami peningkatan yang sangat besar sebagai upaya pemerintah dalam menurunkan warga miskin.

Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 adalah penyelenggaran urusan pemerintah oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk itu, seharusnya proses transformasi kearah pemberdayaan desa terus dilaksanakan dan di dorong semua elemen menuju Otonomi Desa. Apabila melihat jumlah anggaran yang diberikan kepada desa pada tahun 2018 melalui Alokasi Dana Desa mencapai Rp. 1.131.473.276,- untuk Desa Gurung Turi, maka muncul pertanyaan apakah desa beserta elemen yang ada sudah mampu melaksanakan pengelolaan anggaran tersebut secara baik.

Hal ini mengingat bahwa desa melaksanakan pembangunan hanya mendapat bantuan keuangan yang terbatas dan pengelolaannya masih sangat sentralistis oleh satuan instasi pemerintah, dan desa mendapatkan lokasi anggaran yang cukup besar dan pengelolaannya dilakukan secara mandiri, sehingga keraguan terhadap kemampuan desa secara internal untuk mengelola alokasi dana tersebut masih dipertanyakan.

Menurut Doller & Wallis (2001), Alokasi Dana Desa berperan penting dan menjadi kunci utama keberhasilan otonomi desa. Efektivitas dan Efisiensi

penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dari pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Desa serta bagaimana pemanfaatan dana tersebut menjadi sangat penting, karena keduanya merupakan parameter paling sederhana bagi keberhasilan desentralisasi (Ahmad Erany Yustika, 2008). Selain itu juga desa masih banyak memiliki keterbatasan-keterbatasan tertentu khususnya pada organisasi pemerintahannya, sehingga hal tersebut juga akan mempengaruhi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Berdasarkan pertimbangan dan kenyataan diatas, diharapkan keseluruhan Pemerintah desa dapat mengoptimalkan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang dimiliki sehingga penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) ini dapat menggerakkan roda perekonomian desa, maka pembangunan desa akan semakin meningkat. Pembangunan yang meningkat ini diharapkan akan mengurangi disparitas pertumbuhan antar desa. Berdasarkan latar belakang di atas, maka judul penelitian ini yaitu: “Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Gurung Turi Kecamatan Poco Ranaka Kabupaten Manggarai Timur”

**Tabel 1.2**  
**Pagu Dana Desa(Dd) Alokasi Dana Desa(Add) Dan Bhprd**  
**(Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah) Desa Gurung Turi**  
**Kecamatan Poco Ranaka Kabupaten Manggarai Timur.**

TAHUN	SUMBER DANA	ANGGARAN	RINCIAN KEGIATAN	
			BIDANG	REALISASI
2016	ADD	1.057.652.711	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	291.455.643
			Bidang Pelaksanaan Pembangunan	584.051.345.01
	DD		Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	38.897.248
			Bantuan Perumahan Tidak Layak Huni	113.300.000
	BHPRD		Bidang Tak Terduga	10.000.000
	SILPA THN SESUDA DAN SEBELUMNY A		ATK	18.000.000
	<b>TOTAL ANGGARAN</b>	1.057.652.711	<b>TOTAL REALISASI</b>	1.055.704.056
TAHUN	SUMBER DANA	ANGGARAN	RINCIAN KEGIATAN	
2017	ADD	1.235.901.962	Bidang penyelengaran pemerintahan desa	331.692.922
			Bidang Pelaksanaan Pembangunan	751.806.752
	BHPRD		Biang pembinaan kemasyarakatan	37.852.315
			Bidang pemberdayaan masyarakat	4.400.000
			Bidang tak terduga	10.000.000
			Bantuan Rumah tak layak di huni	100.150.000
	<b>TOTAL</b>		1.235.901.962	<b>TOTAL</b>

	ANGGARAN		REALISASI	
TAHUN	SUMBER DANA	ANGGARAN	RINCIAN KEGIATAN	
			BIDANG	REALISASI
2018	ADD	1.131.473.276	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	304.855.696
	DD		Bidang Pelaksanaan Pembangunan	562.445.448
	BHPRD		Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	15.916.350
			Bidang Pemberdayaan Masyarakat	114.808.784
			Bidang Tak Terduga	10.000.000
			Bantuan Rumah Tidak Layak di Huni	119.999.997
<b>TOTAL ANGGARAN</b>	1.131.473.276	<b>TOTAL REALISASI</b>	1.128.026.275	

Sumber: Desa Gurung Turi Kecamatan Poco Ranaka Kabupaten Manggarai Timur.

Berdasarkan dari data di atas bahwa anggaran yang di terima dari Tahun 2016 samapai Tahun 2018 di peruntukan untuk program kegiatan desa sudah efektif atau belum. Tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat, sehingga pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa dapat ditingkatkan.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang judul di atas, maka permasalahan yang akan di kaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam upaya meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Gurung Turi Kecamatan Poco

Ranaka Kabupaten Manggarai Timur ?

2. Apa saja faktor-faktor yang menghambat dalam Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam upaya meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Gurung Turi Kecamatan Poco Ranaka Kabupaten Manggarai Timur?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam upaya meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Gurung Turi Kecamatan Poco Ranaka Kabupaten Manggarai Timur.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam upaya meningkatkan Pembangunan Fisik Di Desa Gurung Turi Kecamatan Poco Ranaka Kabupaten Manggarai Timur.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Gurung Turi Kecamatan Poco Ranaka Kabupaten Manggarai Timur.

Adapun manfaat yang diharapkan antara lain :

1. Sebagai sumbangan pemikiran dan bahan informasi bagi Pemerintah Desa Gurung Turi Kecamatan Poco Ranaka Kabupaten Manggarai Timur dalam mengelola anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) agar lebih efektif diwaktu yang akan datang.
2. Sebagai sumbangan informasi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan menjadi bahan acuan untuk penelitian selanjutnya, dengan objek yang relevan mengenai Alokasi Dana Desa.